

Ujian Akhir Sekolah Tahun 2005 Tata Negara

UAS-SMA-05-01

Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa Latin, yaitu ...

- A. state
- B. staat
- C. status atau statum
- D. d'etat
- E. stetuta

UAS-SMA-05-02

Perbedaan ilmu negara dengan ilmu tata negara ditinjau dari kajian ilmunya, maka ilmu negara adalah ...

- A. praktis, dan ilmu tata negara bersifat operasional
- B. objeknya manusia dan ilmu tata negara objeknya negara
- C. bersifat teoritis dan ilmu tata negara bersifat praktis
- D. bersifat konkrit dan ilmu tata negara bersifat abstrak
- E. terbatas ruang geraknya, ilmu tata negara tidak terbatas

UAS-SMA-05-03

Para ahli memberikan pengertian tentang negara secara berbeda satu sama lainnya, sebab ...

- A. tinjauan tentang negara dari berbagai aspek
- B. negara dipelajari oleh aparatur negara
- C. masalah negara telah dipelajari oleh semua tingkatan pendidikan
- D. negara dapat dipelajari oleh semua orang yang berkepentingan
- E. semua ahli dari berbagai disiplin ilmu dapat mempelajari ilmu negara

UAS-SMA-05-04

George Wilhelm Federich Hegel menyatakan, bahwa negara sebagai organisasi kesusilaan adalah ...

- A. suatu organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk mengatur hubungan antara individu-individu
- B. suatu organisasi yang timbul sebagai sintesa antara kemerdekaan universal dengan individual
- C. suatu organisasi yang memaksa untuk melindungi kelangsungan produksi
- D. negara mengatasi seluruh golongan dalam segala bidang kehidupan
- E. suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian

UAS-SMA-05-05

Sifat monopoli suatu negara merupakan hakikat negara yang artinya ...

- A. mempunyai hak mutlak dalam menetapkan tujuan bersama
- B. negara mempunyai kekuasaan menggunakan keinginannya
- C. memaksa setiap organisasi untuk melakukan kegiatan
- D. mencakup semua aktivitas kekuasaan dalam negara
- E. menjadi warga negara bersifat individual

UAS-SMA-05-06

Asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta sejarah adalah dengan "occupatie" adalah ...

- A. negara-negara kecil saling meleburkan diri menjadi satu negara
- B. suatu negara diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian
- C. timbulnya negara baru di atas wilayah yang pecah
- D. suatu wilayah yang tidak bertuan, diduduki, dan dikuasai
- E. suatu wilayah yang dicaplok oleh negara lain tanpa reaksi

UAS-SMA-05-07

Penduduk yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara disebut ...

- A. penduduk
- B. bangsa
- C. warga negara
- D. rakyat
- E. masyarakat

UAS-SMA-05-08

Dua konsep kelautan pada zaman dahulu yang menimbulkan masalah internasional tentang batas wilayah laut suatu negara adalah ...

- A. maritim dan kontinental
- B. nusantara dan archipelago
- C. marellberum dan respublica
- D. resnullius dan rescommunis
- E. landas benua dan landas kontinen

UAS-SMA-05-09

Di dalam pergaulan internasional yang merupakan unsur penting berdirinya suatu negara baru, yaitu ...

- A. rakyat
- B. wilayah
- C. konstitusi
- D. pengakuan
- E. pemerintah

UAS-SMA-05-10

Suatu negara yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur seluruh wilayah negara ada di tangan pemerintah pusat disebut ...

- A. serikat negara
- B. dominion
- C. federasi
- D. unitaris
- E. union

UAS-SMA-05-11

Suatu unsur yang membedakan bentuk negara dan bentuk kenegaraan adalah ...

- A. rakyat negara
- B. kedaulatan
- C. wilayah negaralain
- D. kekayaan negara
- E. pengakuan dari negara

UAS-SMA-05-12

Perbedaan bentuk pemerintah republik dengan monarki adalah ...

- A. susunan lembaga negaranya
- B. caramemilihkepala negaranya
- C. struktur organisasi pemerintahannya
- D. cara menunjuk anggota lembaga negara
- E. kedudukan lembaga-lembaga negara

UAS-SMA-05-13

Pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak secara sewenang-wenang yang sangat jauh dari cita-cita tentang keadilan disebut ...

- A. tirani
- B. monarki
- C. oligarki
- D. aristokrasi
- E. demokrasi

UAS-SMA-05-14

Kekuatan di parlemen tidak dapat menjatuhkan pimpinan eksekutif. Keadaan ini menunjukkan sistem pemerintahan ...

- A. presidensial
- B. parlementer
- C. quasi
- D. quasi parlementer
- E. demokrasi liberal

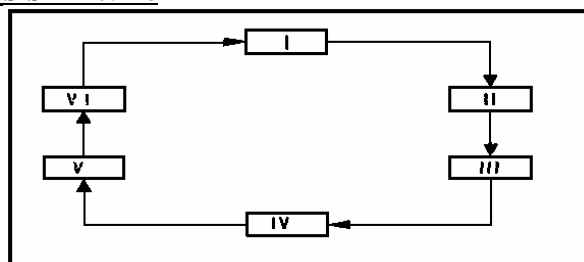
UAS-SMA-05-15

No	Presidensial	Parlementer
1	Perombakan kabinet	Demisioner kabinet
2	Pemerintahan stabil	Pemerintahan labil
3	Mosi tidak percaya	Mosi tidak percaya DPR
4	Presiden mempunyai hak perogatif	Presiden sebagai lambang
5	Memakai trias politica	Memakai trias politica

Berdasarkan tabel di atas perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer ditunjukkan pada nomor ...

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 2, dan 4
- C. 1, 3, dan 5
- D. 2, 3, dan 5
- E. 2, 4, dan 5

UAS-SMA-05-16



Dari bagan (skema) di atas, maka bentuk pemerintahan yang dikuasai oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang dan merupakan pemerosotan, terletak pada nomor ...

- A. I
- B. II
- C. IV
- D. V
- E. VI

UAS-SMA-05-17

Salah satu yang membedakan bentuk pemerintahan monarki dengan republik menurut Leon Duguit adalah ...

- A. cara penunjukan kepala negara
- B. jumlah orang yang memegang kekuasaan
- C. sifat kekuasaan yang dilaksanakan
- D. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan
- E. cara mencapai tujuan suatu negara

UAS-SMA-05-18

Salah satu unsur negara hukum menurut F. J Stahl adalah ...

- A. negara harus berdasarkan hukum
- B. kedaulatan rakyat berdasar perwakilan
- C. undang-undang dibuat oleh parlemen
- D. menteri diangkat dan diberhentikan presiden
- E. kepala negara ditunjuk oleh parlemen

UAS-SMA-05-19

Perbedaan sistem pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah "separation of powers" sedangkan dalam pembagian kekuasaan dikenal dengan istilah ...

- A. devision of powers
- B. the true of law
- C. two treaties on civil government
- D. cheks and balance
- E. the spirit of the law

UAS-SMA-05-20

Salah satu prinsip negara hukum adalah ...

- A. kebebasan beragama harus dijamin
- B. negara yang mempertahankan hukum secara pasif
- C. hak yang sama untuk duduk dalam pemerintahan
- D. memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
- E. mengutamakan kepentingan umum

UAS-SMA-05-21

Salah satu penyebab lahirnya pernyataan hak asasi manusia sedunia di PBB adalah ...

- A. tuntutan merdeka negara-negara di Asia-Afrika
- B. kekalahan Jepang dan Jerman dalam Perang Dunia II
- C. perang dunia yang melibatkan seluruh umat manusia
- D. kemenangan Amerika Serikat dalam Perang Dunia II
- E. prakarsa dari Presiden Amerika Serikat dan PM Inggris

UAS-SMA-05-22

Di Indonesia dokumen kenegaraan yang isinya pertama kali banyak dipengaruhi oleh pernyataan sejagat hak asasi manusia di PBB adalah ...

- A. UUD1945
- B. Piagam Jakarta
- C. Konstitusi RIS
- D. UUD Sementara 1950
- E. Dekrit Presiden

UAS-SMA-05-23

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Pernyataan di atas dikemukakan oleh ...

- A. C. J Federich
- B. R.H Soltau
- C. Prof. Miriam Budiardjo
- D. Kranenburg
- E. Hans Kelsen

UAS-SMA-05-24

Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik berarti ...

- A. sesuatu proses yang membuat seseorang memiliki sikap terhadap gejala politik
- B. mengawasi tindakan/kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan politik
- C. mencari anggota baru yang berbakat dalam organisasi aktif berpolitik
- D. sebagai pengatur konflik yang ada dalam bidang masyarakat bidang politik
- E. menyalurkan aspirasi dan mengomunikasikan kepada pemerintah

UAS-SMA-05-25

Pengertian politik menurut J. Barent adalah ilmu yang menghadapi ...

- A. pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam negara
- B. pengambilan keputusan kolektif untuk masyarakat di dalam negara
- C. pengambilan keputusan melalui sarana umum bagi kepentingan rakyat
- D. kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat
- E. kegiatan suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan

UAS-SMA-05-26

Salah satu kelemahan sistem banyak partai adalah ...

- A. kehidupan rakyat pada umumnya tergantung kepada pemerintah
- B. jarang terjadi pembaharuan dalam pemerintahan
- C. pengawasan yang efektif tidak dapat dilakukan
- D. adanya pengawasan yang terus menerus dari oposisi
- E. rakyat terpecah-pecah ke dalam beberapa partai politik sehingga persatuan dan kesatuan kurang terjamin

UAS-SMA-05-27

Kedudukan Pancasila menurut Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 adalah ...

- A. pandangan hidup bangsa
- B. sumber hukum dasar nasional
- C. alat pemersatu bangsa Indonesia
- D. perjanjian luhur bangsa Indonesia
- E. sumber dari segala sumber hukum

UAS-SMA-05-28

Makna alinea ke satu Pembukaan UUD 1945, antara lain ...

- A. kemerdekaan hak segala bangsa
- B. motivasi nilai spiritual yang luhur
- C. ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
- D. kemerdekaan bukan tujuan akhir
- E. perjuangan telah sampai saat yang menentukan

UAS-SMA-05-29

Yang tidak menjadi wewenang pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah menurut UU nomor 22 tahun 1999 adalah ...

- A. pertanian
- B. pendidikan
- C. perdagangan
- D. wisata dan budaya
- E. hubungan luar negeri

UAS-SMA-05-30

Seorang pejabat daerah yang dilantik oleh pemerintah pusat dengan segala urusannya dipertanggung-jawabkan kepada pemerintah tingkat atas secara vertikal. Sistem ini menggunakan azas ...

- A. sentralisasi
- B. medebewind
- C. desentralisasi
- D. dekonsentrasi
- E. otonomi daerah

UAS-SMA-05-31

Konflik di suatu daerah dapat diredam dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah tersebut. Kebijakan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya ...

- A. korupsi di daerah
- B. intervensi asing
- C. disintegrasi wilayah
- D. krisis kepemimpinan
- E. kerusakan lingkungan

UAS-SMA-05-32

Dalam melaksanakan tugasnya, wewenang Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan yang tertinggi sebagai berikut, *kecuali* ...

- A. A, mengawasi perbuatan notaris yang berkaitan dengan peradilan
- B. mengawasi jalannya peradilan di dalam wilayah hukumnya
- C. memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang dimintakan kasasi
- D. memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara
- E. memutuskan dan menyelesaikan perkara warisan di peradilan negeri

UAS-SMA-05-33

Apabila seorang pencari keadilan mengajukan banding menunjukkan orang tersebut ...

- A. meminta MA mengadili perkaranya
- B. menerima keputusan pengadilan negeri
- C. merasa tidak puas dengan keputusan hakim
- D. meninjau ulang perkara di pengadilan negeri
- E. memerkarakan kembali di tingkat pengadilan tinggi

UAS-SMA-05-34

Wewenang pengadilan tinggi antara lain ...

- A. memeriksa berkas-berkas perkara pada tingkat pertama untuk dilanjutkan ke MA
- B. memberikan penilaian terhadap kinerja hakim yang ada di wilayah hukumnya
- C. mengirimkan berkas-berkas perkara dan memberikan penilaian terhadap hakim
- D. meminta pertanggungjawaban hakim bila ada perkara yang belum selesai
- E. kerja sama dengan jaksa dengan jaksa dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata

UAS-SMA-05-35

Pada masa Orde Baru, Presiden menurut UUD 1945, memegang kekuasaan membentuk undang-undang, sedangkan pada masa amandemen 1 UUD 1945, kekuasaan tersebut ...

- A. masih tetap dipegang oleh Presiden
- B. dikuasai oleh partai pemenang pemilu
- C. dipegang sepenuhnya oleh partai-partai
- D. dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- E. dipegang atas kerja sama Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

UAS-SMA-05-36

Berdasarkan maklumat Pemerintah 14 November 1945 terjadi perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu dari ...

- A. kesatuan menjadi serikat
- B. parlementer menjadi presidensial
- C. presidensial menjadi parlementer
- D. parlemen menjadi ekstraparlemen
- E. serikat menjadi kesatuan

UAS-SMA-05-37

Landasan hukum pelaksanaan pemilu tahun 2004 adalah ...

- A. UU No. 3 tahun 1999
- B. UU No. 2 tahun 1999
- C. UU No. 4 tahun 2002
- D. UU No. 31 tahun 2002
- E. UU No. 12 tahun 2003

UAS-SMA-05-38

UUD 1945 hasil amandemen pada pasal 22 E ayat (2) menyebutnya, pemilu dilaksanakan untuk memilih ...

- A. Anggota DPR/MPR, DPR
- B. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD
- C. Anggota DPR/MPR, DPR, DPRD, Presiden
- D. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden
- E. Anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota Kabupaten

UAS-SMA-05-39

Keppres No. 70/2001 menunjukkan pihak tertentu sebagai penyelenggara pemilu. Pihak yang dimaksud adalah ...

- A. KPU
- B. KPU dan Pemerintah
- C. KPU dan partai politik
- D. KPU, partai politik, pemerintah
- E. KPU, partai politik, pemerintah, dan perwakilan

UAS-SMA-05-40

Undang-undang mengenai pemilu, anggota legislatif menyebutkan untuk melakukan pengawasan pemilu 2004, dibentuk panitia pengawas pemilu dari tingkat ...

- A. pusat sampai ke tingkat kecamatan
- B. pusat sampai ke tingkat desa/kelurahan
- C. pusat sampai ke kota/kabupaten
- D. D, provinsi sampai ke desa/kelurahan
- E. provinsi sampai ke kecamatan

UAS-SMA-05-41

Pada pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2004, pasangan calon Presiden-Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh parpol yang memperoleh sekurang-kurangnya ...

- A. 15 persen dari jumlah kursi DPR
- B. 3 persen dari jumlah kursi DPR
- C. 5 persen dari jumlah kursi DPR
- D. 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara rasional pemilu 2004
- E. 3 persen dari jumlah kursi DPR atau 5persen dari perolehan suara sah secara rasional pemilu DPR

UAS-SMA-05-42

Jika seorang WNI mengangkat sumpah dan janji setia kepada negara lain, maka konsekuensinya menurut UU No. 62 tahun 1958, maka warga negara tersebut ...

- A. dinyatakan keluar dari wilayah RI
- B. dapat dituntut di muka pengadilan
- C. dapat kehilangan kewarganegaraan RI
- D. harus membayar denda kepada negara RI
- E. dinyatakan sebagai pengkhianatan kepada bangsa

UAS-SMA-05-43

Salah satu contoh pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif adalah ...

- A. mengadakan kader-pelatihan kader diplomat
- B. mengirim diplomat senior Indonesia ke PBB
- C. membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRC
- D. menarik kembali Duta Besar yang habis masa jabatannya
- E. menyatakan persona non grata terhadap diplomat asing

UAS-SMA-05-44

Perbedaan perwakilan konsuler dengan perwakilan diplomatik adalah perwakilan konsuler ...

- A. di bidang ekonomi, diplomatik di bidang sosial budaya
- B. di bidang nonpolitik, diplomatik di bidang politik
- C. kedudukan di ibukota negara, diplomatik di kota besar
- D. diangkat oleh menteri dalam negeri, diplomatik diangkat oleh menteri luar negeri
- E. di negara-negara kecil, diplomatik di negara-negara besar

UAS-SMA-05-45

Sumber-sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 38, Piagam Mahkamah Internasional adalah sebagai berikut, *kecuali* ...

- A. perjanjian internasional
- B. kebiasaan internasional
- C. organisasi internasional
- D. pendapat para ahli hukum
- E. asas-asas umum yang diakui oleh bangsa-bangsa

UAS-SMA-05-46

Peranan DPR dalam tahapan atau proses pembuatan atau perjanjian internasional adalah ...

- A. menetapkan juru runding
- B. menandatangani perjanjian
- C. meratifikasi perjanjian
- D. menetapkan masalah perundingan
- E. menetapkan penandatanganan perundingan

UAS-SMA-05-47

Konvensi Wina 1958 tentang hukum laut dapat diklasifikasikan ke dalam perjanjian Internasional yang bersifat ...

- A. Treaty Contract
- B. Peccessive Treaty
- C. Law Making Treaty
- D. Cridentials Committee
- E. Pacta Sunt Servanda

UAS-SMA-05-48

Peranan negara-negara yang memiliki hak veto dalam organisasi PBB adalah ...

- A. berjanji mengembangkan keputusan majelis negara tertentu
- B. agar PBB mampu memelihara kepentingan negara maju
- C. menjalin terpeliharanya keamanan dan ketertiban dunia
- D. memberikan dukungan finansial terhadap stabilitas dunia
- E. memberikan jaminan terpeliharanya kepentingan anggota PBB

UAS-SMA-05-49

Manfaat kerja sama ASEAN bagi bangsa Indonesia adalah ...

- A. meningkatkan harkat dan martabat bangsa
- B. menciptakan ketahanan nasional Indonesia
- C. menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar
- D. memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional
- E. memenuhi seluruh kepentingan nasional bangsa

UAS-SMA-05-50

Permasalahan utama yang dihadapi negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi pada akhir abad ke-20 adalah ...

- A. rendahnya pertumbuhan ekonomi
- B. sulitnya pembayaran utang luar negeri
- C. proteksi yang berlebihan dari negara maju
- D. stabilitas keamanan yang kurang terkendali
- E. pemerataan pembangunan dalam negaranya